

**PENGARUH PERENCANAAN PAJAK DAN ASET PAJAK TANGGUHAN
TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN INDUSTRI BARANG
KONSUMSI YANG TERDAFTAR DIBURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017-
2019.**

**EVELIN R. R. SILALAH
VLORENTINA GINTING**

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Katolik Santo Thomas
evelinsilalahi37@gmail.com, Vlorentinaginting90@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membuktikan secara empiris pengaruh perencanaan pajak dan Aset Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba. Populasi pada penelitian ini adalah semua laporan keuangan perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019. Sampel pada penelitian ini didapatkan dengan cara *Purposive sampling*, dengan jumlah sampel 17 perusahaan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dan pengujian hipotesis menggunakan uji t dan uji f dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa uji secara persial (uji t): (1) perencanaan pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap manajemen laba, hal ini dibuktikan dengan uji t dimana perencanaan pajak memiliki nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,221 < 1,67528$) dengan tingkat signifikan sebesar $0,826 > 0,05$. Yang berarti perencanaan pajak yang dilakukan tidak menjamin dilakukannya manajemen laba oleh perusahaan Bursa Efek Indonesia. (2) aset pajak tangguhan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini dibuktikan dengan uji t dimana beban pajak tangguhan memiliki nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-1,328 < 1,67528$) dengan tingkat signifikan sebesar $0,190 > 0,05$. Yang berarti besarnya perubahan aset pajak tangguhan tidak menjamin diberlakukannya tindakan manajemen laba oleh perusahaan pada Bursa Efek Indonesia. Hasil uji simultan (uji F) perencanaan pajak dan aset pajak tangguhan berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap manajemen laba.

Kata Kunci: Aset Pajak Tangguhan, Manajemen Laba, dan Perencanaan pajak

PENDAHULUAN

Laporan keuangan yang disusun secara baik dan akurat dapat memberikan gambaran keadaan yang nyata mengenai prestasi yang telah dicapai oleh suatu perusahaan dalam kurun waktu tertentu, keadaan inilah yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Pihak internal maupun pihak eksternal sering menggunakan laba sebagai dasar pengambilan keputusan seperti pemberian kompensasi, pembagian bonus pada manajer, dan pengukuran kinerja manajemen. Pihak internal dan eksternal ini meliputi investor, kreditur, pemerintah, bankers, pihak manajemen sendiri dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Laba perusahaan diperhitungkan sebagai informasi yang penting bagi investor dan kreditur serta pemilik perusahaan. Para investor, kreditur dan pemilik perusahaan dapat mengestimasi kekuatan laba guna mengukur resiko dalam investasi dan kredit. Di sisi lain, laba perusahaan merupakan target rekayasa bagi pihak manajemen untuk memaksimalkan kepuasannya. Dengan memilih kebijakan akuntansi tertentu, pihak manajemen sebagai pelaksana dan penanggung jawab operasional perusahaan dapat menaikkan dan menurunkan laba perusahaan sesuai dengan keinginannya.

Manajemen menyadari bahwa pemakaian laporan keuangan cenderung memperhatikan laba, khususnya manajemen yang kinerjanya diukur berdasarkan informasi laba perusahaan. Banyak manajer yang memanfaatkan peluang untuk merekayasa angka laba (*earning management*) pada perusahaannya dengan rekayasa akrual untuk mempengaruhi hasil akhir dari berbagai keputusan salah satunya yaitu meminimalkan beban pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan (Suranggane, 2007:526).

Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Namun, perlu diingat bahwa legalitas manajemen pajak tergantung dari instrumen yang dipakai. Legalitas baru dapat diketahui secara pasti setelah ada putusan pengadilan. Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Suandy, 2017:7).

Selisih laba komersial dan laba fiskal (*book-tax differences*) dapat menginformasikan tentang diskresi manajemen dalam proses akrual. "Selisih tersebut dinamakan koreksi fiskal yang berupa koreksi negatif dan koreksi positif. Koreksi positif akan menghasilkan aset pajak tangguhan" (Djamaluddin, 2013: 58).

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk menimbulkan kewajiban pajak (Suandy, 2017: 7).

Perencanaan pajak didefinisikan suatu proses pembauran usaha- usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak untuk menggunakan fasilitas perpajakan yang digunakan untuk meminimalkan beban atau kewajiban pajaknya, baik yang berupa pajak penghasilan maupun pajak lainnya, dengan cara memanfaatkan fasilitas perpajakan, penghematan pajak, dan penghindaran pajak yang sesuai dengan dan tidak menyimpang dari ketentuan perundang-undangan perpajakan (Harnanto, 2013: 18).

Adanya keinginan dari pihak manajemen untuk membuat beban pajak yang sekecil mungkin, agar pihak manajemen dapat meminimalkan pembayaran pajak. perencanaan pajak didefinisikan suatu proses pembauran usaha-usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak untuk menggunakan fasilitas perpajakan yang digunakan untuk meminimalkan beban atau kewajiban pajaknya, baik yang berupa pajak penghasilan maupun pajak lainnya, dengan cara memanfaatkan fasilitas perpajakan, penghematan pajak, dan penghindaran pajak yang sesuai dengan dan tidak menyimpang dari ketentuan perundang-undangan perpajakan (Harnanto, 2013: 20).

Aset pajak tangguhan adalah aset yang terjadi apabila perbedaan waktu menyebabkan koreksi positif yang berakibat beban pajak menurut akuntansi komersial lebih kecil dibanding beban pajak menurut Undang- Undang Pajak. kewajiban pajak tangguhan adalah jumlah PPh terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak (Agoes dan Trisnawati, 2010: 244).

Manajemen laba merupakan upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi – informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja perusahaan (Sulistiyanto, 2008: 15).

Manajemen laba dapat didefinisikan sebagai tindakan manajemen untuk memilih kebijakan akuntansi dari suatu standar dengan tujuan memaksimalkan utilitas atau nilai pasar. Permasalahan serius yang dihadapi praktisi, akademis akuntansi dan keuangan selama beberapa dekade terakhir ini adalah manajemen laba. Alasannya, pertama manajemen laba seolah-olah telah menjadi budaya perusahaan (*corporate culture*) yang dipraktikkan semua perusahaan di dunia. Sebab aktivitas ini tidak hanya di negara-negara dengan sistem bisnis yang belum tertata, namun juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di negara yang sistem bisnisnya telah tertata. Kedua, sebab dan akibat yang ditimbulkan aktivitas rekayasa manajerial ini tidak hanya menghancurkan tatanan etika dan moral (Suliyanto, 2008:)

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Ikvina (2019), menunjukkan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Namun penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Rivaldo (2020), menyatakan bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Nova (2019), menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Dia (2020), menunjukkan bahwa aset pajak tangguhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Namun penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Rudy dkk (2019), menunjukkan bahwa aset pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Yogi (2019), menunjukkan bahwa aset pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba dengan arah koefisien positif

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Pengaruh Perencanaan Pajak dan Aset Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.***

TELAAH TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Pajak

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2013: 1), “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada

mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

2. Perencanaan Pajak

Dalam penelitian ini perencanaan pajak diukur dengan menggunakan rumus *tax retention rate* (tingkat retensi pajak), yang menganalisis suatu ukuran dari efektivitas manajemen pajak pada laporan keuangan perusahaan tahun berjalan (Wild et al., 2004). Ukuran efektifitas manajemen pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ukuran efektifitas perencanaan pajak. Rumus *tax retention rate* (tingkat retensi pajak) adalah (Wild et al., 2004).

$$TRR_{it} = \frac{Net\ Income_{it}}{Pretax\ Income_{it}}$$

3. Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan adalah aset yang terjadi apabila perbedaan waktu menyebabkan koreksi positif yang berakibat beban pajak menurut akuntansi komersial lebih kecil dibandingkan beban pajak menurut undang-undang pajak (Waluyo, 2008:217). Besarnya aset pajak tangguhan dicatat apabila dimungkinkan adanya realisasi manfaat pajak dimasa yang akan datang, oleh karena itu dibutuhkan *judgement* untuk menaksir seberapa mungkin aktiva tangguhan tersebut dapat direalisasikan.

Rumus :

$$APT_{it} = \frac{\Delta\ Aset\ Pajak\ Tangguhan_{it}}{Aset\ Pajak\ Tangguhan_t}$$

4. Manajemen Laba

Dalam penelitian ini manajemen laba diukur dengan menggunakan *discretionary accruals* sebagai proksi manajemen laba yang dihitung dengan menggunakan *Modified Jones Model*. Kelebihan model ini adalah memecah total akrual menjadi *discretionary accruals* dari aktiva lancar (*current assets*) dan *nondiscretionary accruals* dari aktiva tidak lancar (*fixed assets*).

Model Jones Dimodifikasi (*modified Jones Model*) banyak digunakan dalam penelitian-penelitian akuntansi karena dinilai merupakan model yang paling baik dalam mendeteksi manajemen laba dan memberikan hasil yang paling *robust*.

Tahap-tahap penentuan discretionary accruals adalah sebagai berikut:

1. Menghitung total akrual dengan menggunakan pendekatan aliran kas (*cash flow approach*) yaitu:

$$TAC_a = NI_a - CFO_a$$

2. Menentukan koefisien dari regresi total akrual

Nondiscretionary accruals sebuah perusahaan pada tahun tertentu dihitung dengan meregresi nilai total accruals yang diestimasi dengan perusahaan

OLS (*ordinary least square*) refresion dengan total akrual $\frac{TAC_{it}}{A_{it-1}}$ sebagai variabel

dependennya. Sementara $\beta_1 \frac{1_{it}}{A_{it-1}}$, $\beta_2 \frac{\Delta RE_{it}}{A_{it-1}}$, $\beta_3 \frac{PPE_{it}}{A_{it-1}}$ sebagai variabel independen. Regresi

terhadap keempat komponen menghasilkan nilai (β_1 , β_2 , β_3) yang digunakan untuk menghitung nilai *nondiscretionary accruals*.

$$\frac{TAC_{it}}{A_{it-1}} = \beta_1 \left[\frac{1}{A_{it-1}} \right] + \beta_2 \left[\frac{\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it}}{A_{it-1}} \right] + \beta_3 \left[\frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right] + e$$

3. Menentukan *nondiscretionary accruals*

Dari regresi yang dilakukan menghasilkan koefisien β_1 , β_2 , β_3 tersebut digunakan untuk memprediksi *nondiscretionary accruals* melalui persamaan berikut ini:

$$NDA_{it} = \beta_1 \left[\frac{1}{A_{it-1}} \right] + \beta_2 \left[\frac{\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it}}{A_{it-1}} \right] + \beta_3 \left[\frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right]$$

4. Menentukan *discretionary accruals*

Setelah mendapatkan *nondiscretionary accruals*, kemudian *discretionary accruals* bisa dihitung dengan mengurangi *total accruals* dengan *nondiscretionary accruals*.

$$DA_{it} = \left[\frac{TAC_{it}}{A_{it-1}} \right] - NDA_{its}$$

5. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2017). Berdasarkan kerangka konseptual yang telah dijelaskan maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

H1: Perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

H2: Aset Pajak Tangguhan Berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah 52 perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 17 perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, adapun kriteria yang harus dipenuhi oleh sampel penelitian ini adalah :

1. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019.
2. Mempublikasikan laporan keuangan dan laporan tahunan pada tahun 2017-2019 yang dapat diakses melalui situs BEI (www.idx.co.id)
3. Perusahaan industri barang konsumsi yang memiliki kelengkapan data yang diperlukan selama periode 2017 - 2019.

Perusahaan industri barang konsumsi yang tidak mengalami kerugian selama periode 2017 -2019.

Operasionalisasi Variabel

Manajemen Laba (Y)

Variabel dependen (Y) merupakan variabel yang nilainya dipengaruhi atau tergantung oleh nilai variabel yang lain. Variabel dependen yang digunakan penelitian ini adalah manajemen laba. Manajemen Laba (ML), merupakan kebijakan akuntansi atau

tindakantindakan yang dipilih oleh manajer untuk mencapai beberapa tujuan khusus dalam pelaporan laba. Dalam peneitin ini manajemen laba diukur dengan menggunakan *discretionary accruals* sebagai proksi manajemen laba yang dihitung dengan menggunakan *Modifed Jones Model*. Kelebihan model ini adalah memecah total akrual menjadi *discretionay accruals* dari aktiva lancar (*current assets*) dan *nondiscretionary accruals* dari aktiva tidak lancar (*fixed assets*).

Model Jones Dimodifikasi (*modified Jones Model*) banyak digunakan dalam penelitian-penelitian akutansi karena dinilai merupakan model yang paling baik dalam mendeteksi manajemen laba dan memberikan hasil yang paling *robust*.

Tahap-tahap penentuan discretionary accruals adalah sebagai berikut:

1. Menghitung total alrual dengan menggunakan pendekatan aliran kas (*cash flow approach*) yaitu:

$$TAC_a = NI_a - CFO_a$$

2. Menentukan koefesien dari regreasi total akrual

Nondiscretionary accruals sebuah perusahaan pada tahun tertentu dihitung dengan meregresi nilai total accruals yang diestimasi dengan perusahaan

OLS (*ordinary least square*) refresion dengan total akrual $\frac{TAC_{it}}{A_{it-1}}$ sebagai variabel

dependennya. Sementara $\beta_1 \frac{1_{it}}{A_{it-1}}$, $\beta_2 \frac{\Delta RE_{it}}{A_{it-1}}$, $\beta_3 \frac{PPE_{it}}{A_{it-1}}$ sebagai variabel independen. Regresi terhadap keempat komponen menghasilkan nilai (β_1 , β_2 , β_3) yang digunakan untuk menghitung nilai *nondiscretionary accruals*.

$$\frac{TAC_{it}}{A_{it-1}} = \beta_1 \left[\frac{1}{A_{it-1}} \right] + \beta_2 \left[\frac{\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it}}{A_{it-1}} \right] + \beta_3 \left[\frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right] + e$$

3. Menentukan *nondiscretionary accruals*

Dari regresi yang dilakukan menghasilkan koefesien β_1 , β_2 , β_3 tersebut digunakan untuk memprediksi *nondiscretionary accruals* melalui persamaan berikut ini :

$$NDA_{it} = \beta_1 \left[\frac{1}{A_{it-1}} \right] + \beta_2 \left[\frac{\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it}}{A_{it-1}} \right] + \beta_3 \left[\frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right]$$

4. Menentukan *discretionary accruals*

Setelah mendapatkan *nondiscretionary accruals*, kemudian *discretionary accruals* bisa dihitung dengan mengurangkan *total accruals* dengan *nondiscretionary accruals*.

$$DA_{it} = \left[\frac{TAC_{it}}{A_{it-1}} \right] - NDA_{its}$$

Perencanaan Pajak (X1)

Perencanaan Pajak (PP), merupakan langkah yang ditempuh oleh wajib pajak untuk meminimumkan beban pajak tahun berjalan maupun tahun yang akan datang, agar pajak yang dibayar dapat ditekan seefisien mungkin dan dengan berbagai cara yang memenuhi ketentuan perpajakan.

Dalam penelitian ini perencanaan pajak diukur dengan menggunakan rumus *tax retention rate* (tingkat retensi pajak), yang menganalisis suatu ukuran dari efektivitas manajemen pajak pada laporan keuangan perusahaan tahun berjalan (Wild et al., 2004). Ukuran efektifitas manajemen pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ukuran

efektifitas perencanaan pajak. Rumus *tax retention rate* (tingkat retensi pajak) adalah (Wild et al., 2004).

$$TRR_{it} = \frac{Net\ Income_{it}}{Pretax\ Income_{it}}$$

Keterangan:

TRR_{it} = *tax retention tax* perusahaan i pada tahun t

$Net\ Income_{it}$ = Laba bersih perusahaan i pada tahun t

$Pretax\ Income_{it}$ = Laba sebelum pajak i pada tahun t

Aset pajak Tangguhan (X2)

Aset pajak tangguhan adalah saldo akun dineraca sebagai manfaat pajak yang jumlahnya merupakan jumlah estimasi yang dipulihkan dalam periode yang akan datang sebagai akibat adanya perbedaan sementara antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan dan akibat adanya saldo kerugian yang dapat di kompensasikan pada periode mendatang. Waluyo (2008: 217) dalam penelitian ini aset pajak tangguhan variabel bebas dapat diukur dengan perubahan nilai aset pajak tangguhan pada akhir periode t dengan t-1 dibagi dengan nilai aset pajak tangguhan pada periode akhir periode t.

Rumus

$$APT_{it} = \frac{\Delta APT_{it}}{APT_t}$$

Keterangan:

APT_{it} : Aset Pajak Tangguhan Perusahaan i pada periode t

ΔAPT_{it} : Perubahan Pajak Tangguhan Perusahaan i pada periode t

APT_t : Aset Pajak Tangguhan Perusahaan periode t

Teknik Analisis Data

Model yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda (*Multiple Linear Regression*). Regresi tersebut didasari pada hubungan kasual dari dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen Wiyono (2011:193). Model persamaan regresi linear berganda yang dimaksud adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Manajemen laba

a = konstanta

b_1, b_2 = Koefisien regresi masing-masing variabel independen

X_1 = Perencanaan Pajak

X_2 = Aset pajak tangguhan

e = eror

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Tabel Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	-286.488	581.989		.625
	Perencanaan Pajak	.018	.081	.031	.826
	Aset Pajak Tangguhan	-.073	.055	-.188	.190

a. Dependent Variable: Manajemen Laba

Sumber: Hasil output SPSS 22 (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas maka di peroleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = -286,488 + 0,018 X_1 - 0,073 X_2 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi diatas diperoleh pengertian sebagai berikut:

1. Nilai konstanta artinya -286,488 jika diasumsikan nilai dari variabel X_1 (perencanaan pajak), X_2 (aset pajak tangguhan) adalah konstanta atau sama dengan 0, maka nilai variabel Y (manajemen laba) adalah -286,488 atau -286,488%
2. Nilai koefisien perencanaan pajak adalah 0,18 artinya setiap kenaikan perencanaan pajak 1% akan menurunkan tarif manajemen laba sebesar 0,18 atau 18%. Dengan catatan bahwa variabel lain tetap atau konstanta.
3. Nilai koefisien aset pajak tangguhan adalah -0,73 artinya setiap kenaikan aset pajak tangguhan 7,3% akan menurunkan tarif manajemen laba sebesar -0,073 atau 7,3%. Dengan catatan bahwa variabel lain tetap atau konstanta.

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis determinasi dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui persentasi sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Koefisien ini menunjukkan seberapa besarnya presentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen.

Tabel Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.190 ^a	.036	-.004	911.91259	1.005

a. Predictors: (Constant), Aset Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak

b. Dependent Variable: Manajemen Laba

Sumber: Hasil output SPSS 22 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, besarnya R Square 0,36 hal ini berarti 3,6% variasi manajemen laba dijelaskan oleh variasi ketiga variabel independen yaitu perencanaan pajak, aset pajak tangguhan, sedangkan sisanya 96,4% di pengaruhi oleh variabel lain tidak terungkap atau tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pengujian Hipotesis

Uji t (Uji Signifikan Parsial)

Uji t dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel- variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial (individu). Dengan menggunakan tingkat signifikan ($\alpha = 5\%$), jika nilai signifikan $t > 0,05$ maka hipotesis ditolak artinya, tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel Hasil Uji t (Hasil Signifikan Parsial)

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	-286.488	581.989		.492
	Perencanaan Pajak	.018	.081	.031	.826
	Aset Pajak Tangguhan	-.073	.055	-.188	.190

a. Dependent Variable: Manajemen Laba

Sumber: Hasil output SPSS 22 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa;

1. Perencanaan Pajak

Perencanaan Pajak (X1) memiliki nilai t hitung 0,221 dan tingkat signifikan sebesar 0,826. Nilai koefisien sebesar 0,221 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,67528 dan tingkat signifikan sebesar 0,826 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan Perencanaan Pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap manajemen laba.

2. Aset Pajak Tangguhan

Variabel Aset Pajak Tangguhan (X2) memiliki nilai t hitung -1,328 dan tingkat signifikan sebesar 0,190. Nilai koefisien sebesar -1,328 lebih kecil t tabel sebesar 1,67528 dan tingkat signifikan sebesar 0,190 lebih besar dari 0,05. Ini berarti bahwa Aset Pajak tangguhan berpengaruh negatif dan tidak signifikan. terhadap manajemen laba.

Uji F (Uji Signifikan Simultan)

Tabel Hasil Uji F (Uji Signifikan Simultan)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1497890.416	2	748945.208	.901	.413 ^b
	Residual	39916059.231	48	831584.567		
	Total	41413949.647	50			

a. Dependent Variable: Manajemen Laba

b. Predictors: (Constant), Aset Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak

Sumber: Hasil output SPSS 22 (data diolah)

Berdasarkan uji f diatas dapat dijelaskan bahwa Perencanaan pajak dan aset pajak tangguhan dengan nilai f hitung sebesar 0,901 dan tingkat signifikan sebesar 0,413. Nilai f hitung sebesar 0,901 lebih besar dari f tabel sebesar 3,18 dan tingkat signifikan nya sebesar 0,413 lebih besar dari 0,05. dengan demikian Perencanaan pajak dan assert pajak tangguhan berpengaruh tidak signifikan terhadap manajemen laba.

PEMBAHASAN

Berdasarkan bab evaluasi manajemen laba perusahaan sampel hasil analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis pengaruh perencanaan pajak dan Aset pajak tangguhan dengan objek penelitian di perusahaan *Industri barang konsumsi* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2019 dapat diperoleh hasil sebagai berikut:

Pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perencanaan pajak berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap Manajemen laba pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2017-2019, yang dapat dilihat dari hasil uji parsial koefisien regresi perencanaan pajak (X1) memiliki nilai t hitung 0,221 dan tingkat signifikan sebesar 0,826. Nilai koefisien sebesar 0,221 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,67528 dan tingkat signifikan sebesar 0,826 lebih besar dari 0,05. Ini berarti bahwa perencanaan pajak (X1) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap manajemen laba, sehingga **H1 Ditolak**.

Perencanaan pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Manajemen laba pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2017-2019. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan perencanaan pajak dan manajemen laba pada fenomena yaitu pada Sekar Bumi Tbk nilai perencanaan pajak pada tahun 2017 yaitu sebesar 0,8148 dan pada tahun 2018 menurun menjadi 0,7638. Sedangkan manajemen laba pada tahun 2017 sebesar 0,0144 dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 0,0218. Sedangkan pada Wismilak Inti Makmur Tbk. nilai perencanaan pajak pada tahun 2017 yaitu sebesar 0,7449 dan pada tahun 2018 menurun menjadi 0,7231. Sedangkan manajemen laba pada tahun 2017 sebesar -0,0591 dan pada tahun 2018 meningkat menjadi -0,0139. Semakin besar laba yang diperoleh perusahaan, semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Sebaliknya semakin kecil laba yang diperoleh perusahaan, semakin kecil pula pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Artinya semakin besar laba perusahaan akan membuat semakin besar kewajiban yang harus ditanggung dan diselesaikan oleh perusahaan. Hal

ini menunjukkan bahwa besar kecilnya perencanaan pajak pada perusahaan mempengaruhi manajemen laba.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Ikvina (2019) yang membuktikan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Demikian sama dengan penelitian yang dilakukan Rivaldo dan Dia (2020) yang membuktikan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Namun dalam hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan tidak menjamin dilakukannya praktik manajemen laba, karena adanya rentang waktu perubahan tarif pajak yang membuat kurangnya persiapan dan kematangan perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak, sehingga perencanaan pajak yang dilakukan tidak mempengaruhi pihak manajemen laba dalam melakukan praktik manajemen. Hal ini akan membuat kecenderungan bahwa manajemen akan mementingkan kepentingannya masing-masing dalam hal untuk memperoleh bonus atau *reward* apabila menunjukkan kinerja yang baik. Sehingga manajemen laba yang dilakukan cenderung terjadi karena *self interest* manajemen bukan karena perencanaan pajak yang menjadi kepentingan (*principal*) pemilik perusahaan. Karena perencanaan pajak merupakan keinginan pemilik perusahaan. Dimana pemilik perusahaan menginginkan deviden yang tinggi, dengan mengeluarkan biaya-biaya semaksimal mungkin. Sehingga ada tidaknya perencanaan pajak, tidak mempengaruhi manajemen laba dalam melakukan manajemen laba. Dimana semakin rendah perencanaan pajak maka semakin rendah dalam melakukan manajemen laba.

Dengan adanya perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba karena perencanaan pajak juga tidak dapat mendeteksi perusahaan dalam melakukan manajemen laba. Tujuan lain manajemen melakukan manajemen laba melalui perencanaan pajak adalah untuk meminimalkan beban Pph supaya perusahaan membayar pajak semakin rendah, hal ini tersebut tidak terbukti adanya perencanaan pajak untuk tujuan manajemen laba.

Sebagai negara berkembang, Indonesia masih mengalami kesulitan dalam melakukan administrasi perpajakannya secara memadai. Hal ini, mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan Wajib Pajak akibat luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang belum efektif. Perusahaan melakukan perencanaan pajak bertujuan untuk penghematan pembayaran pajak yang akan dibayarkan kepada pemerintah. Penerapan perencanaan pajak ini harus sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku saat ini. Manajemen laba merupakan tindakan mengatur laporan keuangan untuk memperoleh keuntungan.

Perencanaan pajak merupakan langkah awal sebelum perusahaan melakukan pembayaran pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan. Perusahaan selalu menginginkan jumlah biaya yang menjadi tanggungannya kecil agar perusahaan bisa memperoleh laba usaha yang tinggi. Laba usaha yang tinggi akan menguntungkan pemilik perusahaan. Manajer sebagai pihak yang bertanggungjawab mengupayakan laba yang tinggi untuk mendapatkan berbagai bonus yang ditawarkan pemilik perusahaan jika manajer mampu mencapai target yang diharapkan. Perencanaan pajak dilakukan dengan berbagai cara agar pembayaran pajak mampu ditekan seminimal mungkin

sehingga laba perusahaan semakin meningkat. Cara yang ditempuh manajer untuk meminimalkan pembayaran pajak tersebut merupakan tindakan manajemen laba.

Pengaruh aset pajak tangguhan Terhadap manajemen laba

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aset pajak tangguhan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Manajemen laba pada perusahaan industry barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2017-2019. Hal ini dibuktikan dari hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa nilai t hitung $-1,328$ dan tingkat signifikan sebesar $0,190$. Nilai koefisien sebesar $-1,328$ lebih kecil t tabel sebesar $1,67528$ dan tingkat signifikan sebesar $0,190$ lebih besar dari $0,05$. Ini berarti bahwa aset pajak tangguhan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pajak penghasilan sehingga **H2 ditolak**.

Artinya Aset pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan aset pajak tangguhan dan manajemen laba pada fenomena yaitu pada Kino Indonesia Tbk pada tahun 2017 nilai aset pajak tangguhan sebesar $0,4764$ dan pada tahun 2018 menurun menjadi $0,2637$. Sedangkan manajemen laba pada tahun 2017 sebesar $-0,0609$ dan pada tahun 2018 meningkat menjadi $-0,0332$. Sedangkan pada Sekar Bumi Tbk nilai aset pajak tangguhan pada tahun 2017 yaitu sebesar $0,2508$ dan pada tahun 2018 menurun menjadi $0,1009$. Sedangkan manajemen laba pada tahun 2017 sebesar $0,0144$ dan pada tahun 2018 meningkat menjadi $0,0218$. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya aset pajak tangguhan pada perusahaan tidak mempengaruhi manajemen laba.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan Nova dan Rudy (2020) yang menunjukkan bahwa aset pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan Dia (2020) menyatakan bahwa aset pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba.

Besarnya perubahan aset pajak tangguhan tidak menjamin tidak diberlakukannya tindakan manajemen laba oleh perusahaan. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan alasan mengapa manajemen perusahaan manufaktur di Indonesia tidak memanfaatkan aset pajak tangguhan untuk melakukan manajemen laba (*Earning Management*). Pertama, karena adanya keterkaitan antara aset pajak tangguhan dengan ketentuan perpajakan, maksudnya bila manager memanfaatkan aset pajak tangguhan pada laporan komersial untuk melakukan manajemen laba maka hal ini dapat berimbas pada laporan keuangan fiskal sehingga manager harus berfikir agar besarnya aset pajak tangguhan tidak merugikan perusahaan. Kedua, karena manajemen perusahaan tidak ingin memanfaatkan celah dari kebijakan yang ada dalam PSAK No. 46 tentang pajak tangguhan karena kebijakan tersebut baru berlaku pada tahun 2001. Jadi besarnya aset pajak tangguhan belum tentu menjamin perusahaan untuk melakukan manajemen laba. Sehingga dapat disimpulkan aset pajak tangguhan semakin tinggi maka kemungkinan semakin rendah terhadap manajemen laba untuk menghindari melaporkan kerugian perusahaan dan nilai parameter yang positif.

Aset pajak tangguhan juga memiliki adanya resiko ketika perusahaan ingin memanfaatkan aset pajak tangguhan sebagai sarana untuk melakukan manajemen laba. Resiko tersebut yaitu transaksi akan menggantung dan menumpuk. Apabila nantinya benar-benar timbul perbedaan yang mengakibatkan kewajiban PPh menurun atau setelah

pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak menghasilkan ketetapan pajak yang lebih kecil tidak akan menjadi masalah, tetapi jika sebaliknya maka bisa menggantung bertahun-tahun. Dan apabila tahun-tahun berikutnya ada pengakuan aset pajak tangguhan yang baru, maka akan semakin terjadi penumpukan. Sehingga laporan keuangan akan menjadi diragukan dan akan menjadi perhatian pengguna yang mempunyai kepentingan, seperti kreditur atau pemegang saham. Sehingga akan mengurangi tingkat kepercayaan kreditur atau pemegang saham terhadap laporan keuangan yang disajikan.

Aset pajak tangguhan yang jumlah nya diperbesar oleh manajemen dimotivasi untuk minimalisasi pembayaran pajak agar tidak merugikan perusahaan. Pajak yang seharusnya dibayarkan pada periode sekarang dialihkan pada periode mendatang dengan demikian laba perusahaan pun akan meningkat karena beban pajak yang harus dibayarkan lebih kecil. Aset pajak tangguhan disebabkan karena terpulihkannya jumlah pajak penghasilan di periode mendatang, sebagai dampak dari perbedaan temporer yang dikurangkan dengan sisa kompensasi kerugian. Aset pajak tangguhan dapat dicatat jika terdapat kemungkinan terjadinya realisasi manfaat pajak dimasa mendatang, oleh karena itu diperlukan judgement supaya dapat menaksir realisasi aset pajak tangguhan

Menurut pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) No.46 revisi 2012 menyatakan aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian. Peraturan ini dapat memberikan kebebasan manajemen untuk menentukan kebijakan akutansi yang digunakan dalam penilaian aset pajak tangguhan pada laporan keuangannya, sehingga dapat digunakan untuk mengindikasikan ada tidaknya rekayasa laba atau manajemen laba yang digunakan oleh perusahaan dalam laporan keuangan yang dilaporkan dalam rangka menghindari penurunan atau kerugian laba.

Asset pajak tangguhan pada prinsipnya dapat dijadikan celah untuk melakukan manajemen laba, tetapi kosekuensi pada laporan keuangan fiskal yaitu jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan lebih besar.

Manajemen mempertimbangkan resiko dan kerugian melakukan rekayasa asset pajak tangguhan. Hal ini akan mengurangi tingkat kepercayaan oleh pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan yang disajikan terkait ketidak handalan terhadap laporan keuangan. Asset pajak tangguhan yang dilakukan perusahaan juga tidak menjamin dilakukannya praktik manajemen laba, karena apabila asset pajak tangguhan perusahaan mempercepat suatu pengakuan pendapatan atau menanggukhan beban, sehingga beban perusahaan akan semakin tinggi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh perencanaan pajak dan aset pajak tangguhan manajemen laba pada perusahaan manufaktur di bursa efek indonesia maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Perencanaan pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, karena nilai t_{hitung} 0,221 < t_{tabel} 1,67528, dengan tingkat signifikansi 0,826 > 0,05 maka H_1 ditolak.

2. Aset pajak tangguhan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, karena nilai $t_{hitung} -1,328 < t_{tabel} 1,67528$, dengan tingkat signifikansi $0,190 > 0,05$ maka H_2 ditolak.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran kepada peneliti selanjutnya yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat memperluas penelitian dengan menambahkan variabel dan jumlah sampel lain yang dapat mempengaruhi manajemen laba.
2. Penelitian selanjutnya dapat memperluas tahun dan menggunakan metode penelitian yang berbeda pula untuk mendapatkan hasil yang lebih otentik.
3. Sebaiknya, untuk penelitian selanjutnya mencoba pada jenis perusahaan lain selain manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S., dan Trisnawati, E., (2010), *Akuntansi Perpajakan, Edisi 2 Revisi*, Jakarta: Salemba Empat.
- Djamaluddin (2013). *Akuntansi Perpajakan*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Harnanto. 2013. *Perencanaan Pajak*. Edisi pertama. Cetakan kedua. BPFE. Yogyakarta
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2012. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: IAI
- Pohan, C., Anwar . 2013. *Manajemen Perpajakan*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- PSAK NO 46. *Akutansi Pajak Penghasilan*.
- Suandy, 2017. *Perencanaan Pajak*. Jakarta : Salemba Empat
- Sulistyanto, H. Sri. 2008. *Manajemen Laba: Teori dan Model Empiris*. Jakarta: Grasindo.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suranggane, Z. (2007) *Analisis Aktiva Pajak Tangguhan Untuk Mengidentifikasi Earning Management*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Trisnawati. 2013. *Akutansi Perpajakan*. Edisi 3. Jakarta : Salemba Empat.
- Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2000 *tentang Pengertian Pajak*
- Wild, John J., K.R. Subramanyam, dan R.F.,Halsey. 2005. *Financial Statement Analysis. (Analisis Laporan Keuangan)*. Jakarta: Salemba Empat
- Waluyo. 2008. *Akutansi Pajak*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Wild. 2013. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- www.idx.com
- Zain, Mohammad. 2003. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat